PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Jumat Tanggal: 09 Oktober 2020 Halaman: 2

Tribun Corner

Substansi Tuntutan dan Aksi Damai

Ribut Raharjo

KAMIS (8/10), Malioboro menjadi saksi bisu kerucuhan massa aksi tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Bahkan menjelang petang, terjadi berkali-kali kericuhan. Lemparan berbagai benda, entah itu batu, kayu, pecahan beton, botol, dan lainnya, berbalas lontaran gas air mata.

Kerusakan pun muncul di mana-mana. Mulai dari kendaraan aparat, kendaraan masyarakat, juga fasilitas yang memperkantik kawasan wisata itu.

Gedung DPRD DIY pun tak terelakan dari kerusakan. Bahkan satu kafe yang begitu melegenda terbakar dan tinggal puing.

Kita tentu sedih melihat peristiwa kerusuhan ini. Tujuan utama menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh dan karyawan pun justru meleset.

Kita sepakat dengan apa yang disampaikan Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana. Dia mengajak agar massa melakukan unjuk rasa secara damai. "Kami mohon dan minta agar unjuk rasa disampaikan dengan cara-cara yang kondusif. Mari berdialog dan jangan sampai berbuat onar," ucap Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana saat itu.

Tapi massa bergeming hingga akhirnya insiden saling lempar kembali terulang dan mengakibatkan sejumlah peserta yang berada di lokasi mengalami luka-luka.

"Kerusuhan-kerusuhan ini sama sekali tidak membantu tuntutan para pekerja. Insiden ini hanya akan menodai perjuangan rekan-rekan pekerja maupun tuntutan yang menginginkan agar UU Ciptaker dicabut," katanya.

Banyak cara elegan untuk menyampaikan tuntutan tersebut. Satu di antaranya melalui pengajuan judicial review.

Bahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan siap atas datangnya gelombang pengajuan judicial review (JR) oleh elemen masyarakat yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

"Ya pasti siap. MK memastikan siap," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi, Kamis (8/10).

Fajar memastikan, majelis hakim konstitusi dalam memutus suatu uji materi tidak akan terpengaruh oleh kekuasaan mana pun. Ia pun meminta agar masyarakat ikut memantau jalannya persidangan uji materi UU Cipta Kerja.

"Insya Allah, MK enggak akan terkurangi kejernihan berpikirnya dengan peristiwa apa pun, apalagi menyangkut kebenaran dan keadilan berdasarkan UUD. Publik silakan ikut memantau proses penanganan perkara, mari ikut memastikan penanganan perkara berjalan sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas dia.

Di sisi lain, kita mengapresiasi masyarakat Yogyakarta yang kemudian berbondong-bondong melakukan kerja bakti membersihkan Malioboro.

Malioboro adalah napas Yogyakarta. Di sana banyak orang menggantungkan hidupnya. Sangat disesalkan jika di lokasi itu terjadi kerusuhan yang dampaknya jelas merugikan para pencari rejeki di lokasi itu.

Unjuk rasa, demonstrasi adalah bagian dari berdemokrasi. Namun menyatakan pendapat dengan santun dan mengawal substansi tuntutan, adalah langkah elegan. Aksi damai. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005